

SURAT TUGAS

Nomor : 002.1/KP.01.03/NB-03/01/2026

KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LOMBOK BARAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan kinerja serta tugas dan fungsi Staf Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat diperlukan penyesuaian pembagian tugas staf pelaksana untuk mengemban tugas dan fungsi; dan
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menetapkan pembagian staf pelaksana dalam Divisi-Divisi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
6. Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 1/KP.01.00/NB/01/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang penetapan Koordinatoar Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2026.

MENUGASKAN:

- Kepada : **Daftar Nama Terlampir.**
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Staf Pelaksana di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat terhitung sejak ditetapkan Surat Tugas ini;
2. Bahwa pembagian Divisi sebagai berikut:
- a. Sumber Daya Manusia, Organisasi & Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:
- 1) Keuangan;
- 2) SDM Pengawas; dan
- 3) SDM Kepegawaian.
- b. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat;
- c. Hukum dan Penyelesaian Sengketa; dan
- d. Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi.

3. Bahwa sebagaimana pada angka 2 tugas masing-masing Divisi terdiri atas:
- a. **Sumber Daya Manusia, Organisasi & Pendidikan dan Pelatihan:** mengelola keuangan, kepegawaian, dan logistik, menyediakan dukungan administrasi bagi seluruh divisi, menyusun perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan, mengelola sarana prasarana dan arsip kelembagaan mendukung pelaksanaan tugas pengawas adhoc
 - b. **Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat:** menyusun dan melaksanakan strategi pencegahan pelanggaran pemilu/pilkada, melakukan sosialisasi, pendidikan pengawasan partisipatif, dan kampanye anti politik uang, mengembangkan jejaring pengawasan dengan masyarakat, media, dan organisasi masyarakat, mengelola kehumasan, publikasi, dan dokumentasi kegiatan Bawaslu, menyampaikan informasi dan klarifikasi kepada publik melalui media
 - c. **Hukum dan Penyelesaian Sengketa:** menyusun kajian hukum dan pendampingan hukum kelembagaan, mengelola dokumentasi hukum dan putusan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, menyelesaikan sengketa proses pemilu/pilkada, menyusun putusan dan rekomendasi.
 - a. **Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi:** Menerima dan menindaklanjuti laporan serta temuan pelanggaran, mengkaji dugaan pelanggaran administrasi, pidana, dan kode etik, melaksanakan penanganan pelanggaran bersama Sentra Gakkumdu, mengelola data hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran, mengoperasikan serta memutakhirkan sistem informasi (termasuk aplikasi pengawasan), menyediakan data dan informasi untuk kebutuhan internal dan publik
4. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Gerung, 08 Januari 2026
Koordinator Sekretariat,


Muhamad Taisir
NIP. 199109082020121005

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 3. Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Barat
- 4. Pertinggal

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 002.1/KP.01.03/NB-03/01/2026
Tanggal : 08 Januari 2026

Daftar Nama Dan Penempatan Divisi Pegawai Bawaslu Kabupaten Lombok Barat

No	Nama	Status	Jabatan	Bagian/Divisi	Penanggungjawab/ Kordiv
1	Doni Brilliant	CPNS	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN - Ahli Pertama (Subbag Administrasi)	Operator Keuangan	Muhamad Taisir
2	Baiq Khaerunnisa	PPPK	Perencana - Ahli Pertama	Keuangan	
3	Rizky Khairunnisa	PPPK	Perencana - Ahli Pertama (Subbagian Administrasi)	Keuangan	
4	Dila Harteti Ningsih	PPPK	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama (Subbagian Administrasi)	SDMO & DIKLAT	Abdurrahman
5	Siti Farihat	PPPK	Arsiparis - Terampil (Subbagian Administrasi)	SDMO & DIKLAT	
6	Abhar	PPPK	Analisis Kebijakan - Ahli Pertama (Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat)	SDMO & DIKLAT	
7	Khaerunnisa' Diyah Fitri	PPPK	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum - Ahli Pertama (Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat)	SDMO & DIKLAT	
8	Baiq Hartuty Cahyati	PPPK	Arsiparis - Terampil (Subbagian Administrasi)	SDMO & DIKLAT	
9	Jayadi	PPPK	Penata Kelola Pengawasan Pemilu - Ahli Pertama (Subbagian Penanganan Pelanggaran,	P2H (Pencegahan, Parmas, & Humas)	Samsul Hadi

			Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum)		
10	Musahab	PPPK	Analisis Kebijakan - Ahli Pertama (Subbagian Pengawasan Pemilu Dan Hubungan Masyarakat)	P2H (Pencegahan, Parmas, & Humas)	
11	Muhamad Abdullah	PPPK	Arsiparis - Ahli Pertama (Subbagian Administrasi)	P2H (Pencegahan, Parmas, & Humas)	
12	Baiq Mentari Febriani	PPPK	Penata Kelola Pengawasan Pemilu - Ahli Pertama (Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum)	P2H (Pencegahan, Parmas, & Humas)	
13	Lalu Imam Setiadi	PPPK	Hubungan Masyarakat - Ahli Pertama	P2H (Pencegahan, Parmas, & Humas)	
14	Auliya Haris	CPNS	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum - Ahli Pertama (Subbagian Pengawas Pemilu dan Hubungan Masyarakat)	P2H (Pencegahan, Parmas, & Humas)	Hesty Rahayu
15	Wahyu Sapriyly	PPPK	Penata Kelola Pengawasan Pemilu- Ahli Pertama	HPS (Hukum & Penyelesaian Sengketa)	
16	Muhamad Ihsan	PPPK	Penata Kelola Pengawasan Pemilu - Ahli pertama	HPS (Hukum & Penyelesaian Sengketa)	
17	Nurfaridah	PPPK	Arsiparis - Ahli Pertama	HPS (Hukum & Penyelesaian Sengketa)	
18	Ni Kadek Rika Yunita	CPNS	Analisis Hukum - Ahli Pertama (Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum)	HPS (Hukum & Penyelesaian Sengketa)	

19	Firman	PPPK	Analisis Hukum - Ahli Pertama (Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum)	HPS (Hukum & Penyelesaian Sengketa)	
20	Lalu Muhammad Rizal Junaidi	PPPK	Penata Kelola Pengawasan Pemilu - Ahli Pertama	PP & DATIN (Penanganan Pelanggaran & Data Informasi)	Ma'rifatullah
21	Firmansyah	PPPK	Penata Kelola Pengawasan Pemilu - Ahli Pertama	PP & DATIN (Penanganan Pelanggaran & Data Informasi)	
22	Murni	PPPK	Penata Kelola Pengawasan Pemilu - Ahli Pertama (Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum)	PP & DATIN (Penanganan Pelanggaran & Data Informasi)	
23	Ismail	Outsourcing	Staf Operasional Penunjang	Umum	
24	Lalu Edwin Sanjaya	Outsourcing	Staf Operasional Penunjang	Umum	Muhamad Taisir
25	Ardi Hidayat	Outsourcing	Staf Operasional Penunjang	Umum	
26	Kumbara Ali Putra	Outsourcing	Staf Operasional Penunjang	Umum	

Koordinator Sekretariat,



Muhamad Taisir
NIP. 199109082020121005